

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA MINDIPTANA
(414072)**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**



Jln. Nusantara No.50 C
Kab. Boven Digoel - Papua

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

KANTOR UPBU MINDIPTANAH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah KEMENTERIAN PERHUBUNGAN yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KANTOR UPBU MINDIPTANAH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

MINDIPTANAH, 30 Juni 2023
Kepala Kantor UPBU Mindiptanah

ARIF TRILAKSONO PUTRO
NIP. 197610251998031001



DAFTAR ISI

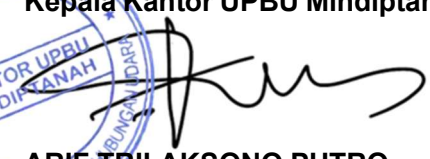
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	

C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	30
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KANTOR UPBU MINDIPTANAH yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

MINDIPTANAH, 30 Juni 2023
Kepala Kantor UPBU Mindiptanah

ARIE TRILAKSONO PUTRO
NRP. NIP. 197610251998031001



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KANTOR UPBU MINDIPTANAH Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp124,715,430 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp124,715,430 atau mencapai 70.67 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp176,465,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3,282,492,426 atau mencapai 52.19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6,289,814,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp72,036,630,275 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32,065,016; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp72,004,565,259 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp130,982,890 dan Rp71,905,647,385

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp125,485,446 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5,693,061,755 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-5,567,576,309, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5,567,576,309.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp74,315,446,698, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-5,567,576,309 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3,157,776,996 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp71,905,647,385

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	176,465,000	124,715,430	70.67	144,735,238
JUMLAH PENDAPATAN		176,465,000	124,715,430	70.67	144,735,238
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2,708,366,000	1,550,897,177	57.26	1,082,728,525
Belanja Barang	B.2.2	3,512,980,000	1,731,595,249	49.29	1,409,704,127
Belanja Modal	B.2.3	68,468,000	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		6,289,814,000	3,282,492,426	52.19	2,492,432,652

MINDIPTANAH, 30 Juni 2023
 Kepala Kantor UPBU Mindiptanah

ARIF TRILAKSONO PUTRO
 NIP. 197610251998031001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	125,485,446	145,505,254
Jumlah Pendapatan		125,485,446	145,505,254
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	1,647,780,067	1,224,730,806
Beban Persediaan	D.4	355,747,380	252,838,150
Beban Barang dan Jasa	D.5	306,495,205	340,216,000
Beban Pemeliharaan	D.6	914,413,850	496,292,000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	167,148,814	187,317,127
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	2,301,476,439	2,357,190,009
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		5,693,061,755	4,858,584,092
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5,567,576,309)	(4,713,078,838)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	456
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	456
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5,567,576,309)	(4,713,078,382)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(5,567,576,309)	(4,713,078,382)



MINDIPTANAH, 30 Juni 2023
Kepala Kantor UPBU Mindiptanah

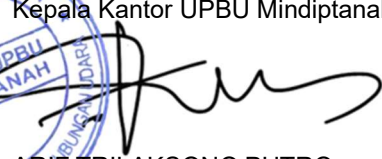
ARIF TRILAKSONO PUTRO
NIP. 197610251998031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	74,315,446,698	78,974,152,299
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(5,567,576,309)	(4,713,078,382)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(150,000,000)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	(150,000,000)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	(150,000,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3,157,776,996	2,347,696,958
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,409,799,313)	(2,515,381,424)
EKUITAS AKHIR	E.6	71,905,647,385	76,458,770,875

MINDIPTANAH, 30 Juni 2023
Kepala Kantor UPBU Mindiptanah



ARIF TRILAKSONO PUTRO
NIP. 197610251998031001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20,100,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	770,016	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	11,195,000	9,405,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		32,065,016	9,405,000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	15,550,105,279	15,550,105,279
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	24,886,704,800	24,886,704,800
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	67,418,190,000	67,418,190,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	35,738,074,000	35,738,074,000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(71,588,508,820)	(69,287,032,381)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		72,004,565,259	74,306,041,698
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	348,000	348,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(348,000)	(348,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		72,036,630,275	74,315,446,698
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	110,882,890	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	20,100,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		130,982,890	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-

JUMLAH KEWAJIBAN		130,982,890	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	71,905,647,385	74,315,446,698
JUMLAH EKUTAS		71,905,647,385	74,315,446,698
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		72,036,630,275	74,315,446,698

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KANTOR UPBU MINDIPTANAH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN PERHUBUNGAN yang merupakan entitas pelaporan dari KANTOR UPBU MINDIPTANAH. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valutaasing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbulhak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	176,465,000	176,465,000
Jumlah Pendapatan	176,465,000	176,465,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,708,366,000	2,708,366,000
Belanja Barang	3,512,980,000	3,512,980,000
Belanja Modal	68,468,000	68,468,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	6,289,814,000	6,289,814,000

Realisasi
Pendapatan
Rp124,715,430

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp124,715,430 atau mencapai 70.67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp176,465,000. Pendapatan KANTOR UPBU MINDIPTANAH terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp124,715,430. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya jumlah penerbangan pada semester 1 tahun 2023. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	176,465,000	124,715,430	70.67
Jumlah		124,715,430	70.67

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	124,715,430	144,735,238	(13.83)
Jumlah	124,715,430	144,735,238	(13.83)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak untuk yang berakhir pada 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp124,715,430 dan Rp144,735,238 Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 13.83 dari TA 2022

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	124,715,430	144,735,238	(13.83)
Jumlah	124,715,430	144,735,238	(13.83)

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,523,844	4,908,852	(7.84)
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	120,191,586	139,826,386	(14.04)
Jumlah	124,715,430	144,735,238	(13.83)

B.2 Belanja

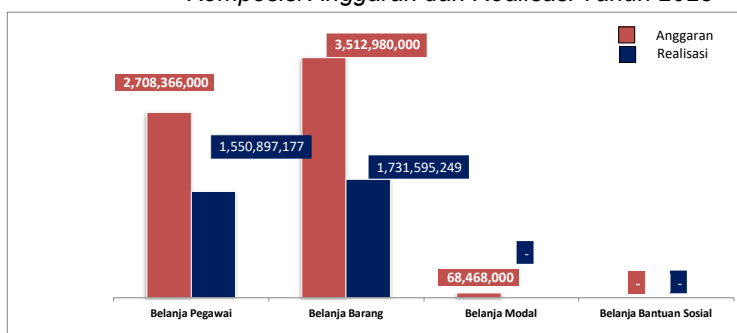
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp3,282,492,426 atau 52.19 % dari anggaran belanja sebesar Rp.6,289,814,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2,708,366,000	1,550,897,177	57.26
Belanja Barang	3,512,980,000	1,731,595,249	49.29
Belanja Modal	68,468,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	6,289,814,000	3,282,492,426	52.19

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 31.70% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	1,550,897,177	1,082,728,525	43.24
Belanja Barang	1,731,595,249	1,409,704,127	22.83
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3,282,492,426	2,492,432,652	31.70

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp1,550,897,177

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,550,897,177 dan Rp1,082,728,525. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 43.24 % dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	529,466,180	381,593,640	38.75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,272	6,426	90.97
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34,832,592	26,861,630	29.67
Belanja Tunj. Anak PNS	11,203,172	9,387,276	19.34
Belanja Tunj. Struktural PNS	4,320,000	5,940,000	(27.27)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,600,000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	1,300,000	(100.00)
Belanja Tunj. Beras PNS	40,894,380	32,662,560	25.20
Belanja Uang Makan PNS	94,072,000	58,325,000	61.29
Belanja Tunjangan Umum PNS	34,280,000	22,680,000	51.15
Belanja Uang Lembur	17,511,000	29,913,000	(41.46)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	710,150,753	456,968,993	55.40
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat T	16,000,000	12,900,000	24.03
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	55,555,000	44,190,000	25.72
Jumlah Belanja kotor	1,550,897,349	1,082,728,525	43.24
Pengembalian Belanja Pegawai	172	-	-
Jumlah Belanja	1,550,897,177	1,082,728,525	43.24

Realisasi Belanja
Barang
Rp1,731,595,249

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,731,595,249 dan Rp1,409,704,127.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	216,570,000	207,116,000	4.56
Belanja Barang Non Operasional	10,000,000	50,000,000	(80.00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	364,578,380	246,545,000	47.87
Belanja Jasa	65,925,205	73,100,000	(9.82)
Belanja Pemeliharaan	907,372,850	645,626,000	40.54
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	167,148,814	187,317,127	(10.77)

Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,731,595,249	1,409,704,127	22.83
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,731,595,249	1,409,704,127	22.83

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp20,100,000*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20,100,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
TUNAI	20.100.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan : Tidak memiliki Rekening Bendahara Penerimaan

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

*Piutang Bukan Pajak
Rp770,016*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp770,016 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	770,016	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	770,016	-

C.5 Persediaan

*Persediaan
Rp11,195,000*

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp11,195,000 dan Rp9,405,000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan

Rincian Persediaan Semester I TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	11,195,000	9,405,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	11,195,000	9,405,000

*Persediaan yang Belum
Diregister Rp0*

C.6 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tanah Rp0

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 30 Juni 2023	-

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.8 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp15,550,105,279*

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp15,550,105,279 dan Rp15,550,105,279. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	15,550,105,279
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 30 Juni 2023	15,550,105,279
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(10,565,554,861)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	4,984,550,418

*Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0*

C. 9 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan Bangunan
Rp24,886,704,800*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24,886,704,800 dan Rp24,886,704,800. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	24,886,704,800
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	24,886,704,800
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(3,164,115,148)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	21,722,589,652

*Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0*

C.11 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp67,418,190,000*

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.67,418,190,000 dan Rp.67,418,190,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	67,418,190,000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	67,418,190,000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(57,858,838,811)
Nilai Buku per	9,559,351,189

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belum
Diregister Rp0*

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.14 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp35,738,074,000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.35,738,074,000 dan Rp.35,738,074,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	35,738,074,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	35,738,074,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	35,738,074,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0*

C.15 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
Rp71,588,508,820*

C17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp71,588,508,820 dan Rp69,287,032,381. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15,550,105,279	(10,565,554,861)	4,984,550,418
2	Gedung dan Bangunan	24,886,704,800	(3,164,115,148)	21,722,589,652
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,418,190,000	(57,858,838,811)	9,559,351,189
4	Aset Tetap Lainnya	35,738,074,000	-	35,738,074,000
	Akumulasi Penyusutan	143,593,074,079	(71,588,508,820)	72,004,565,259

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KANTOR UPBU MINDIPTANAH berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C .19 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

.
1
9

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Aset Lain-lain Rp348,000

C.20 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp348,000 dan Rp348,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	348,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2023	348,000
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2023	(348,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.21 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

**Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset Lainnya
348,000**

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp348,000 dan Rp348,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	348,000	(348,000)	-
-	-	-	-
Total	348,000	(348,000)	-

**Utang kepada
Pihak
Ketiga Rp110,882,890**

C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp110,882,890 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

**Uang Muka dari KPPN
Rp20,100,000**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20,100,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	20,100,000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	20,100,000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Ekuitas Rp71,905,647,385

C. 25 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp71,905,647,385. dan Rp74,315,446,698. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 26 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan

Rp0

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp125,485,446

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp125,485,446 dan Rp145,505,254. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13.76. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,293,860	5,678,868.00	(6.78)
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	120,191,586	139,826,386.00	(14.04)
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	125,485,446.00	145,505,254.00	(13.76)

Beban Pegawai Rp1,647,780,067

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,647,780,067 dan Rp1,224,730,806.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 34.54 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 . Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	597,560,780	487,208,280	22.65
Beban Pembulatan Gaji PNS	13,402	8,105	65.35
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39,370,992	34,525,010	14.04
Beban Tunj. Anak PNS	12,655,520	12,000,288	5.46
Beban Tunj. Struktural PNS	4,860,000	7,020,000	(30.77)
Beban Tunj. Fungsional PNS	2,925,000	325,000	800.00
Beban Tunj. PPh PNS	-	1,625,000	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1,647,780,067	1,224,730,806	34.54

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp355,747,380 dan Rp252,838,150

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 40.70 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	355,747,380	252,838,150	40.70
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	355,747,380.00	252,838,150	40.70

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp306,495,205 dan Rp340,216,000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9.91 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	183,920,000	129,300,000	42.24
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46,650,000	53,050,000	(12.06)
Beban Bahan	10,000,000	-	-
Beban Langganan Listrik	11,440,500	-	-
Beban Langganan Telepon	4,980,925	-	-
Beban Jasa Konsultan	49,503,780	40,000,000	23.76
Beban Barang Operasional Lainnya	-	34,766,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	50,000,000	(100.00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	33,100,000	(100.00)
Jumlah	306,495,205	340,216,000.00	(9.91)

Beban Pemeliharaan
Rp914,413,850

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp914,413,850 dan Rp496,292,000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 84.25 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	298,537,000	240,126,000	24.33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	301,400,000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110,150,000	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	197,285,850	25,500,000	673.67
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,041,000	666,000	957.21
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	230,000,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah	914,413,850	496,292,000	84.25

Beban Perjalanan Dinas
Rp167,148,814

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp167,148,814 dan Rp187,317,127

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10.77 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	167,148,814	187,317,127	(10.77)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	167,148,814.00	187,317,127	(10.77)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada

Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2,301,476,439*

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,301,476,439 dan Rp2,357,190,009.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	857,394,541	913,108,113	(6.10)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	286,805,077	286,805,075	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,050,395,611	1,050,395,611	-
Beban Penyusutan Irigasi	100,925,714	100,925,714	-
Beban Penyusutan Jaringan	5,955,496	5,955,496	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2,301,476,439	2,357,190,009	(2.36)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2,301,476,439	2,357,190,009	(2.36)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Operasional Lainnya Rp0 Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp456.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	456.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	456	(100.00)

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp74,315,446,698.00

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.74,315,446,698.00 dan Rp.78,974,152,299.00

Defisit LO
Rp.5,567,576,309.00

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.5,567,576,309.00 dan Rp.4,713,078,382.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-150,000,000 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-150,000,000. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp3,157,776,996

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3,157,776,996 dan Rp.2,347,696,958. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,282,492,426
Diterima dari Entitas Lain	(124,715,430)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	3,157,776,996

Ekuitas Akhir
Rp71,905,647,385

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.71,905,647,385.00 dan Rp.76,458,770,875.00.

Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA